

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU

Mohammad Ratmasa Serang

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jln. Ir. M. Putuhena, Kode Pos : 97233 Ambon
e-mail : mohserang002@gmail.com

ABSTRACT

Human development according to UNDP (United Nation Development Program) is a process to expand choices for the population. When referring to this definition, the population becomes the ultimate goal of development, while the development effort is a means (principal means) for that purpose. Human development achievements in Maluku Province are low compared to Indonesia's human development index. In general, research aims to optimize the achievement of human development performance by looking for determinants / determinants that affect the performance of human development in the district / city of Maluku Province. Specifically this study aims to 1) analyze partially the effect of government expenditure (economic expenditure) on human development performance 2) partially analyze the effect of government health-education expenditure, 3) analyze partially the effect of labor productivity level on human development performance and 4) partial analysis of the influence of demographic factors represented by the number of population on the performance of human development in the district / city of Maluku Province 2009-2014. The analytical method used is qualitative descriptive and quantitative analysis. The quantitative analysis tool used is the Data Panel regression model for secondary data of districts / cities in Maluku Province for the period 2009-2014. There are several approaches to estimating the panel data regression model, so it is necessary to conduct a series of statistical tests to obtain the most efficient and best regression parameters (BLUE, Best Linear Unbiased Regression). The stages of statistical testing include: First stage, Testing estimation models using Restricted F-Test, LM Test and Hausman Test, Second stage, testing violations of classical assumptions.

Keywords : Human Development, Government expenditure, productivity and Data Panels

JEL : I25, H53, D24, C23

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu negara dalam jangka panjang adalah menciptakan tingkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut banyak negara berkembang yang mengalami kegagalan karena strategi pembangunan yang dijalankan lebih berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*).

Perubahan paradigma strategi pembangunan mulai mengalami perubahan seiring dengan keberhasilan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan) dalam mempercepat pembangunan ekonominya dengan memprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia melalui investasi sumber daya manusia (*human capital investment*).

Pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat melalui usaha-usaha untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas modal manusia akan memberikan manfaat dalam meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan individu tersebut sehingga akan meningkatkan kesejahteraannya.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia telah dikembangkan dan diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) tahun 1990 yang dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) atau biasa dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberadaan IPM yang dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*)

dapat menjelaskan atau mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu Pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Semakin tinggi IPM di suatu wilayah/daerah mencerminkan prestasi atau keberhasilan capaian pembangunan manusia yang telah dijalankan oleh masing-masing daerah.

Pentingnya pembangunan yang menempatkan manusia sebagai salah satu tujuan akhir dari proses pembangunan, maka pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama 189 negara menyepakati program *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan fokus utama pembangunan manusia. Program tersebut memiliki batas waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Indonesia termasuk negara yang menjalankan program MDGs dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Target MDGs yang harus dicapai hingga tahun 2015 yaitu: (1) mengurangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua masyarakat, (3) mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya pendidikan serta pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian balita, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) mencegah HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, (7) menjamin lingkungan berkelanjutan, (8) memperkuat kemitraan global antara negara kaya dan negara miskin.

Penekanan terhadap pentingnya kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena dengan sumber daya yang unggul akan menghasilkan seluruh tatanan kehidupan yang maju diberbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga kualitas manusia memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengolahan pembangunan wilayahnya.

Tinggi rendahnya keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah/daerah secara teori ditentukan faktor kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan investasi publik atau pengeluaran pemerintah untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Investasi publik pemerintah biasanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur/fasilitas publik khususnya fasilitas pendidikan, layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch dalam Aloysius Gunadi Brata (2002), pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya

adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006).

Pembangunan manusia juga sangat erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja pembangunan manusia dapat melalui saluran pendapatan/tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Semakin rendah produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan atau rendahnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga.

Rumah tangga atau penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: pengeluaran makanan, kesehatan dan pendidikan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma K. Ginting, 2008).

Produktivitas tenaga kerja yang rendah menyebabkan pendapatan rendah/miskin sehingga menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Fakta menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Maluku masih menghadapi tingkat kemiskinan serius yang masih menempatkan Provinsi Maluku sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masuk kategori peringkat ke-3 setelah Provinsi Papua dan Papua Barat (BPS, 2014).

Karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia nasional, maka pembangunan yang dijalankan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan secara merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah-wilayah tertinggal di Provinsi Maluku.

Secara makro-ekonomi, pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku masih merupakan salah satu sumber pertumbuhan atau sumber perluasan pasar. Fakta ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat masih memberikan sumbangan dominan terhadap pertumbuhan dan perbaikan kinerja pembangunan manusia dari sisi permintaan agregat.

Kondisi di kebanyakan kabupaten/kota Provinsi Maluku masih diperhadapkan pada belum meratanya distribusi penduduk antar wilayah. Karena itu prioritas pembangunan manusia masih bertumpu pada wilayah-

wilayah yang padat penduduknya. Wilayah-wilayah yang padat penduduknya akan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibanding wilayah lain yang jarang penduduknya.

Secara nasional, prestasi pembangunan manusia yang dicapai oleh Provinsi Maluku tampak belum mengembirakan atau masih relatif rendah dibanding dengan IPM tingkat nasional, dengan capaian rata-rata Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2008-2014 adalah sebesar 71,80 % sedangkan pada periode yang sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah sebesar (72,77%). Capaian prestasi pembangunan manusia tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**Tabel (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku dan IPM Indonesia, Tahun 2008-2014**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)							Rata-Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Maluku Tenggara Barat	67,58	68,10	68,83	69,23	69,57	69,87	69,90	69,01
2	Maluku Tenggara	71,45	72,13	72,45	72,85	73,27	73,60	73,65	72,77
3	Maluku Tengah	69,63	70,32	70,86	71,25	71,55	71,81	71,85	71,04
4	Buru	68,03	68,70	69,36	69,75	70,54	70,79	70,83	69,71
5	Kep. Aru	69,36	69,93	70,09	70,33	70,91	71,29	71,32	70,46
6	Seram Bagian Barat	68,67	69,21	69,64	70,07	70,4	70,75	70,78	69,93
7	Seram Bagian Timur	67,06	67,66	68,09	68,53	68,9	69,11	69,19	68,36
8	Maluku Barat Daya	65,96	66,24	66,60	66,99	6,38	67,67	67,69	66,93
9	Buru Selatan	67,71	68,17	68,78	69,13	69,97	70,23	70,26	69,18
10	Kota Ambon	77,86	78,25	78,56	78,97	79,41	79,58	79,63	78,89
11	Kota Tual	75,90	76,20	76,51	77,10	77,62	77,91	77,95	77,03
Provinsi Maluku		70,38	70,96	71,42	71,87	72,42	72,70	72,85	71,80
Indonesia		71,17	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81	74,33	72,77

Sumber: BPS Provinsi Maluku (data diolah)

Meski pembangunan ekonomi yang telah dicapai di Provinsi "seribu pulau" ini mengisyaratkan tren peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,07 % per tahun (tahun 2008-2014) ternyata belum mampu mengangkat prestasi pembangunan manusia Provinsi Maluku pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional. Ditinjau dari perkembangan IPM kabupaten/kota, tampak bahwa mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Maluku masih memiliki IPM yang relatif rendah atau memiliki Indeks Pembangunan Manusia lebih rendah dari rata-rata capaian IPM di tingkat provinsi sebesar 71,80%.

Komparasi secara spasial memperlihatkan bahwa hanya 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang

memiliki capaian IPM tinggi karena memiliki nilai IPM di atas rata-rata IPM provinsi. Kotamadya Ambon memperlihatkan dominasinya dengan capaian rata-rata IPM tertinggi sebesar 78,89 % disusul oleh Kota Tual dengan IPM sebesar 77,03% dan peringkat ketiga ditempati oleh Kabupaten Maluku Tenggara dengan nilai IPM sebesar 72,77 %.

Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia/modal manusia (*human capital*) dapat dilihat dari besaran alokasi anggaran daerah untuk investasi publik khususnya anggaran pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat seiring juga dengan dinamika kemampuan daerah secara mandiri

untuk menggali potensi keuangan dan memanfaatkannya untuk kebutuhan pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan manusia.

Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan RI, mencatat pada tahun 2008, persentase belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan di Provinsi Maluku adalah sebesar 21,57 % kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 17,24% tahun 2014. Selama periode 2008-2014, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon menunjukkan dominasinya dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata besaran belanja masing-masing sebesar 65,09% per tahun (Maluku Tengah) dan 51,30 per tahun (Kota Ambon) sedangkan Kota Tual hanya mengalokasikan belanja rata-rata sebesar 9,56 % per tahun dan menempatkannya sebagai wilayah yang memiliki rata-rata alokasi belanja pendidikan dan kesehatan terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. belanja pemerintah di sektor ekonomi cenderung fluktuatif dan bervariasi antar wilayah.

Pada tahun 2008, alokasi belanja pemerintah untuk sektor ekonomi di Provinsi Maluku adalah sebesar 14,46 % dan mengalami peningkatan menjadi 14,99 % tahun 2014, dengan rata-rata alokasi sebesar 14,05 % per tahun. Kabupaten Maluku Tengah tampak dominan dalam alokasi belanja ekonomi dibanding kabupaten/kota lainnya dengan persentase alokasi sebesar 10,79 % rata-rata per tahun, sedangkan Kota Tual hanya mengalokasikan persentase belanja terendah rata-rata sebesar 4,24 % per tahun.

Fenomena yang telah dikemukakan menarik untuk diteliti lebih jauh dan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hubungan atau pengaruh pengeluaran pemerintah (pendidikan, kesehatan & ekonomi), produktivitas tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap kinerja Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Maluku Periode 2008-2014.

Rumusan Masalah

Prestasi Pembangunan manusia di Provinsi Maluku belum mengembirakan atau masih relatif rendah yang ditunjukkan oleh nilai IPM Provinsi Maluku masih relatif lebih rendah dibanding IPM nasional. Ditinjau dari perkembangan IPM kabupaten/kota, tampak bahwa mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Maluku masih memiliki nilai IPM yang relatif rendah atau memiliki Indeks Pembangunan Manusia di bawah nilai rata-rata capaian IPM Provinsi Maluku sebesar 71,80% seiring dengan masih rendahnya alokasi pengeluaran pendidikan

& kesehatan pemerintah, tingkat produktivitas tenaga kerja yang belum optimal.

Adapun rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh belanja/pengeluaran ekonomi pemerintah terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2008-2014?
2. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pendidikan dan kesehatan pemerintah terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2008-2014?.
3. Seberapa besar pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2008-2014?
4. Seberapa besar pengaruh faktor demografi terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran ekonomi pemerintah, pendidikan & kesehatan pemerintah, produktivitas tenaga kerja dan faktor demografi (jumlah penduduk) secara simultan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh belanja ekonomi pemerintah terhadap kinerja pembangunan manusia secara parsial di kabupaten/kota Provinsi Maluku, periode 2009-2014.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pendidikan dan kesehatan terhadap kinerja pembangunan manusia secara parsial di kabupaten/kota Provinsi Maluku, periode 2009-2014.
3. Menganalisis pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja pembangunan manusia secara parsial di kabupaten/kota Provinsi Maluku, periode 2009-2014.
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran ekonomi pemerintah, pengeluaran pendidikan & kesehatan, produktivitas tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap kinerja pembangunan manusia secara simultan di kabupaten/kota Provinsi Maluku, periode 2009-2014.

Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dilakukan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, merupakan pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbang

- positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya peneliti dan praktisi ilmu ekonomi serta sebagai bahan kajian bagi penelitian lanjutan yang memfokuskan penelitiannya tentang determinan indeks pembangunan manusia.
3. Bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi.

LANDASAN TEORITIS

Konsep Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2006) pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Produktivitas.

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2) Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3) Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

- 4) Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2006), dewasa ini pemikiran tentang pembangunan (paradigma) telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Ada enam alasan mengapa paradigma pembangunan manusia ini bernilai penting, yaitu: (1) Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; (2) Mengemban misi pemberantasan kemiskinan; (3) Mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; (4) Memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (5) Memperkuat basis *civil society* dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan (6) Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Basu *dalam* Hamudy, 2008).

Menurut Basi (2002), hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu yang otonom, yang memungkinkan mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggulan sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan internasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur rata-rata pencapaian atau prestasi pembangunan manusia suatu negara/daerah dalam tiga hal mendasar, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar

hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan/pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.

Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

Kemampuan Daya Beli Penduduk atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan *income per capita*. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan.

Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya pengeluaran pemerintah daerah dapat digolongkan atas 2 kelompok:

1. Pengeluaran/belanja rutin pemerintah (pengeluaran/belanja tidak langsung) yaitu belanja yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi dibedakan menjadi dua : subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan bunga utang negara. Anggaran belanja rutin tersebut memiliki peran yang penting guna menunjang jalannya pemerintahan, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan anggaran rutin tersebut agar terjadi kesinambungan antara jumlah pengeluaran dengan hasil yang di dapatkan. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesobroto, 2014).
2. Pengeluaran Pembangunan (belanja langsung) merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki sifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana yang didapatkan oleh pemerintah. Dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar

dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Kinerja Pembangunan Manusia

Kinerja pembangunan manusia yang biasanya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Secara teori untuk meningkatkan komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia maka pemerintah dapat melakukan sejumlah pengeluaran atau belanja sebagai bentuk investasi pemerintah dalam membiayai atau mendanai fasilitas atau barang-barang publik khususnya pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih serta memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.

Secara tidak langsung investasi pemerintah memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia karena prasarana maupun pelayanan yang disediakan pemerintah ini berguna dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Semakin baik dan lengkap prasarana dan layanan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi akan berakibat pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya semakin kurang kepedulian pemerintah daerah terhadap perbaikan kualitas sarana dan layanan pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur ekonomi akan berdampak pada penurunan kinerja pembangunan manusia.

Konsep Produktivitas Tenaga Kerja dan Penduduk

Secara makro, produktivitas adalah rasio antara ukuran *output* tertentu dibandingkan dengan ukuran *input* atau sumber daya tertentu (McEachern, 2000). Produktivitas mengukur seberapa efisien sumber daya yang digunakan. Hal ini berarti semakin tinggi produktivitas, maka semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi dengan jumlah sumber daya tertentu. Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang pekerja setiap jam kerjanya. Pertumbuhan produktivitas merupakan kunci untuk meningkatkan standar hidup bagi suatu negara sebab standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.

Ahli lain berpandangan bahwa Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil kerja yang di capai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (Kusniyanto, 1986). Menurut Melayu S.P. Hasibuan (1996) Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika Produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Jadi, produktivitas itu sendiri merupakan gambaran kemampuan pekerja dalam menghasilkan output. Semakin tinggi output yang dihasilkan oleh seorang pekerja, menunjukkan semakin tinggi tingkat produktivitas pekerja tersebut.

Selain itu, produktivitas dapat juga didefinisikan sebagai suatu konsep universal yang menciptakan lebih banyak barang dan jasa bagi kehidupan manusia dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Menurut Manuaba (1992) peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (*do the right thing*) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (*do the thing right*). Dengan kata lain bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total (Tarwaka, Bakri, dan Sudiajeng, 2004).

Penambahan *input* tenaga kerja pada proses produksi akan menyebabkan kenaikan pada *output*. Akan tetapi, *output* tersebut akan semakin menurun ketika semakin banyak *input* tenaga kerja yang ditambahkan. Hal tersebut lebih akrab disebut sebagai produktivitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal physical productivity*). Produktivitas fisik marjinal yang semakin menurun berlaku pada fungsi produksi jangka pendek.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkungannya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam sektor ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi.

Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat, sebaliknya tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah akan menciptakan kemiskinan yang semakin meluas. Menurut UNDP (1996), banyaknya penduduk miskin akan mempengaruhi pembangunan manusia karena kelompok yang masuk pada kelompok ini memiliki keterbatasan pada faktor produksi sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibat produktivitas yang rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima jauh dari cukup.

Dampaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi akan kesulitan untuk mencapai keberhasilan pembangunan manusia.

Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau terjadi pengurangan kemiskinan akan berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran yang

dibelanjakan untuk kebutuhan makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.

Hubungan Penduduk dengan Kinerja Pembangunan Manusia

Dampak penduduk terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu, 1) dampak negatif, penduduk dipandang sebagai beban bagi pembangunan. 2) dampak positif bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar dan memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan ekonomi (Todaro & Smith, 2006). Dampak negatif atau positif jumlah penduduk yang terjadi di suatu wilayah sangat ditentukan oleh kondisi wilayah dan karakteristik pertumbuhan, kualitas dan penyebaran penduduk.

Dalam penelitian ini, jumlah penduduk merupakan sumber perluasan pasar atau permintaan agregat yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Semakin besar jumlah penduduk maka berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan diharapkan berpengaruh positif juga pada kinerja pembangunan manusia.

Kondisi ini juga berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah yang lebih difokuskan pada wilayah-wilayah yang padat penduduknya dibanding wilayah/daerah yang jarang penduduknya. Provinsi Maluku masih diperhadapkan pada tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah dan tingkat penyebaran penduduk yang belum merata.

Review Studi Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2008) bertujuan menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data time series dan *cross section* atas 26 provinsi pada periode 1996, 1999, 2002, 2004, 2005 dan 2006. Alat analisis menggunakan model regresi Panel Data metode *random effect*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Maliendra (2009) menganalisis dampak pemekaran wilayah dan faktor-

Faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2002-2006 dengan menggunakan alat analisis model Regresi Panel. Periode waktu yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu tahun 2002-2003 periode sebelum adanya pemekaran dan tahun 2004-2006 periode setelah adanya pemekaran. Dari hasil pengolahan data dengan model *fixed effect* GLS, diketahui bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi pembangunan manusia Propinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5 persen adalah tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan belanja publik.

Penelitian Priska (2010) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia. Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada alfa 1%.

Studi Patta (2012) bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian dengan menggunakan taraf nyata 5% menemukan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan, dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh persentase penduduk miskin dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian Hidayahwati (2010) bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan jenis data time series tahunan periode 2003 sampai dengan tahun 2007 dan data cross section 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemandirian fiskal dilihat dari PAD/total pendapatan daerah, komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, BHUMD dan PAD lainnya yang sah), dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Model analisis yang digunakan adalah analisis panel data dengan pendekatan *fixed effect* dan pendekatan *random effect*.

Untuk menentukan pendekatan mana yang baik untuk digunakan dalam penelitian maka digunakan uji Hausman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Komponen PAD yaitu pajak daerah dan BHUMD berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan retribusi dan PAD lainnya yang sah berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Penelitian Mirza (2012) menganalisis pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009.

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian dengan menggunakan data panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup Provinsi Maluku yang secara administratif mencakup 11 kabupaten/kota yaitu 1) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), (2) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), (3) Kota Tual, (4) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), (5) Kabupaten Buru, (6) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), (7) Kabupaten Kep. Aru, (8) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), (9) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBI), (10) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), (11) Kotamadya Ambon.

Penelitian ini difokuskan pada data periode 2008-2014 dengan pertimbangan ketersediaan/kelengkapan data. Penelitian ini berlangsung bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2014.

Adapun periode waktu penelitian yang dipilih adalah tahun 2008 sampai tahun 2014. Waktu penelitian dimulai pada tahun 2008 dengan pertimbangan kebutuhan jumlah observasi yang memadai data panjang untuk mengatasi persoalan *degree of freedom*. Di samping itu juga karena pertimbangan akurasi atau presisi dan ketajaman hasil analisis.

Jenis dan Sumber Data

Ditinjau dari sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data yang diambil dari berbagai institusi (lembaga) yang relevan dengan penelitian. Data bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan RI. Menurut waktu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan panel data yaitu gabungan antara *data time series* (runtut waktu) dan data *cross-section*. Data *time series* yang digunakan adalah data periode 2009-2014 sedangkan data *cross-section* mencakup data 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Metode Pengolahan dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikategorikan sesuai dengan variabel-variabel yang telah diidentifikasi dalam kerangka pemikiran dan operasionalisasi variabel, yang selanjutnya diolah dengan *software*/program komputer yaitu program *MS-Excel* dan *EVIEWS 6.0*

Metode Analisis

Secara kuantitatif, untuk menganalisis pengaruh investasi publik sektor pendidikan & kesehatan, investasi publik sektor ekonomi, tingkat kemandirian fiskal daerah dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Maluku, menggunakan model/alat analisis regresi panel data.

$$IPM = f(GEK, GKS, PTK, JPE) \quad (1)$$

$$IPM_{it} = \alpha_0 + \beta_1 GEK_{it} + \beta_2 GKS_{it} + \beta_3 PTK_{it} + \beta_4 JPE + e_{it} \quad (2)$$

dimana: IPM adalah Kinerja pembangunan manusia, diukur dengan nilai indeks pembangunan manusia (persen), PEK adalah pengeluaran/belanja ekonomi pemerintah, diukur dengan nilai belanja ekonomi pemerintah daerah dalam APBD (juta rupiah).

GKS adalah pengeluaran/belanja pendidikan & kesehatan pemerintah, diukur dengan nilai belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah dalam APBD (juta rupiah). PTK adalah produktivitas tenaga kerja, diukur dengan rasio tenaga kerja yang bekerja terhadap PDRB (juta rupiah), JPE adalah jumlah penduduk, diukur dengan jumlah penduduk tahunan (orang). $\alpha_0, \beta_1, \dots, \beta_4$ adalah parameter konstanta dan koefisien regresi. e adalah *error term*.

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi data panel, pertama, *Common effect Model (Ordinary Least Square, OLS)*. Kedua, *fixed effect Model (Least Square dummy variable model, FEM)*. Ketiga, *random effect Model (REM)* (Baltagi, 2002; Gujarati, 2009). Di antara ketiga teknik tersebut, pendekatan yang dipilih apakah *Common Effect Model, Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effects Model (REM)* akan ditentukan melalui suatu pengujian statistik uji-F, Uji LM dan uji Hausman. Adapun mekanisme pengujian/pemilihan model estimasi panel data sebagai berikut:

1. Uji-F/*Restricted F-statistics* merupakan pengujian statistik yang bertujuan untuk memilih apakah lebih baik menggunakan *Common Effect Model (Pooled Least Square)* atau *Fixed Effect Model*. Jika F-hitung (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari F-tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H_0 sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect* dan sebaliknya. Rumusnya adalah:

$$F = \frac{RSS_1 - RSS_2 / m}{(RSS_2) / (n - k)} \quad (3)$$

dimana RSS_1 dan RSS_2 adalah *residual sum of squares* teknik tanpa variabel *dummy* dan teknik *fixed effect* dengan variabel *dummy*, m adalah restriksi dalam model tanpa variabel *dummy*. $(n-k)$ adalah derajat kebebasan (*df denominator*).

2. Uji LM (*Lagrange Multiplier Test*) digunakan untuk memilih model estimasi apakah lebih baik menggunakan *Common Effect Model/OLS* atau *Random Effect Model (REM)*. Uji LM dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang didasarkan pada nilai residual *Common Effect Model* dan distribusi *Chi-Square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Apabila nilai statistik uji LM > *Chi-Square* tabel maka menolak H_0 (*Common Effect Model*) dan menerima H_a (*Random Effect Model*). Adapun rumus uji LM adalah:

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N (\sum_{t=1}^T e_{it})^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right] \quad (4)$$

dimana NT adalah jumlah observasi (jumlah kabupaten/kota dikalikan jumlah periode waktu). e adalah residual.

3. *Hausman Test* adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau menggunakan model *random effect*. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* (χ^2) dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel

independent. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Random Effect* (REM) (Widarjono, 2005).

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji-t (uji parsial) dan uji simultan (uji-F) pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Secara parsial maka dirumuskan hipotesis statistik satu sisi (*one tail*) sebagai berikut:

- Koefisien regresi variabel belanja ekonomi pemerintah (GEK).

$H_0: \beta_2 \leq 0$: Pengeluaran ekonomi pemerintah tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_a: \beta_2 > 0$: Pengeluaran ekonomi pemerintah berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

- Koefisien regresi pengeluaran pendidikan & kesehatan pemerintah (GKS).

$H_0: \beta_1 \leq 0$: Pengeluaran pendidikan & kesehatan tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

$H_a: \beta_1 > 0$: Pengeluaran pendidikan & kesehatan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

- Koefisien regresi variabel produktivitas tenaga kerja (PIK)

$H_0: \beta_4 \leq 0$: Tingkat produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_a: \beta_4 > 0$: Tingkat produktivitas tenaga kerja berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

- Koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JEP)

$H_0: \beta_4 \leq 0$: Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

$H_a: \beta_4 > 0$: Jumlah penduduk berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

Formula untuk mendapatkan nilai t-statistik (t-hitung) adalah:

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta_k}{\text{Se}(\beta_k)} \quad (5)$$

- Kriteria pengambilan keputusan (uji-t).
 - Apabila t hitung $>$ t tabel maka tolak hipotesis nol (H_0) . terima hipotesis alternatif (H_a).
 - Apabila t hitung $<$ t tabel maka terima hipotesis nol (H_0) dan tolak hipotesis alternatif (H_a). Atau dapat melihat nilai probabilitas (*p-value*) t-statistik dari paket program Eviews 6.0 dengan kriteria sebagai berikut:
 - Jika nilai probabilitas (*p-value*) $<$ $\alpha; 5\%$ maka tolak hipotesis nol (H_0) dan terima hipotesis alternatif (H_a).
 - Jika nilai probabilitas (*p-value*) $>$ $\alpha; 5\%$ maka terima hipotesis nol (H_0) dan tolak hipotesis alternatif (H_a).

Pengujian hipotesis statistik melalui uji-F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi dapat mempengaruhi variabel dependen secara simultan/bersama-sama dengan rumusan hipotesis adalah $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ atau $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$. Jika F hitung $>$ F tabel (kritis), maka kita menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Jika F hitung $<$ F tabel (kritis), maka kita menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_a). Rumusnya adalah:

$$F\text{-statistik} = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - k)} \quad (6)$$

dimana R^2 adalah koefisien determinasi. n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter.

Nilai koefisien determinasi (R^2) akan digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel terikat (variabel dependen) dapat diterangkan oleh variabel bebas (variabel independen).

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, kinerja pembangunan manusia dijadikan sebagai variabel terikat/dependent. Terdapat 4 (empat) variabel bebas (independen) yaitu pengeluaran ekonomi pemerintah (GEK), pengeluaran/belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah (GKS), produktivitas tenaga kerja (PIK) dan jumlah penduduk (JPE). Adapun definisi operasional variabel tersebut adalah:

- Kinerja pembangunan manusia adalah kemampuan/capaian suatu daerah dalam

- pembangunan manusia, yang biasa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Indeks pembangunan manusia adalah indeks komposit untuk mengukur sejauh mana keberhasilan/prestasi pembangunan manusia di suatu wilayah (dalam satuan persen). Indeks komposit terdiri dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (indikator pendidikan), angka harapan hidup (kesehatan), pengeluaran perkapita disesuaikan (daya beli/ekonomi masyarakat).
 - Pengeluaran pendidikan & kesehatan pemerintah adalah pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah maupun gedung sekolah, pembelian obat, fasilitas kesehatan dan gedung kesehatan. Variabel ini diukur dengan nilai belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah dalam APBD (dalam juta rupiah).
 - Pengeluaran ekonomi pemerintah adalah pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat. Variabel ini diukur dengan nilai

belanja urusan ekonomi pemerintah daerah dalam APBD (dalam juta rupiah).

- Produktivitas tenaga kerja adalah rasio atau perbandingan antara tenaga kerja dengan output/PDRB di suatu wilayah.
- Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang mendiami suatu wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam satuan orang/jiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Teknik Estimasi Panel Data Dengan Restricted F-Statistic/Chow Test

Uji-F (*Restricted F-statistic Test*) merupakan pengujian statistik yang bertujuan untuk memilih apakah lebih baik menggunakan *Common Effect Model* ataukah *Fixed Effect Model*. Jika nilai F-hitung (F-statistik) lebih besar dari nilai F-tabel atau signifikan secara statistik, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H_0 sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji-F diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel (1) Ringkasan Restricted F-Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: DATA2			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	149.030283	(10,51)	0.0000
Cross-section Chi-square	224.964808	10	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh nilai F-statistik sebesar 149,030283. Nilai F-tabel dengan numerator 10 dan denominator 51 pada $\alpha=5\%$ adalah sebesar 2,022175. Oleh karena, F-statistik sebesar 149,030283 > F-tabel (2,022175) atau nilai *P-value Cross-section F* sebesar 0,000 < 0,05 maka H_0 (*Common Effect*

Model) ditolak dan menerima H_a (*Fixed Effect Model*). Dengan demikian, teknik estimasi regresi panel data yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Pemilihan Teknik Estimasi Panel Data Dengan Uji-LM

Uji LM (Lagrange Multiplier Test) digunakan untuk memilih teknik estimasi apakah lebih baik menggunakan *Common Effect Model*/OLS ataukah

Random Effect Model (REM). Uji LM dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang didasarkan pada nilai residual *Common Effect Model* dan distribusi Chi-Square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Apabila nilai statistik uji LM > Chi-Square tabel maka menolak H_0 (*Common Effect Model*) dan menerima H_a (*Random Effect Model*).

$$LM = \frac{11(6)}{2(6-1)} \left[\frac{1399,357}{312,939} - 1 \right]^2 = 79,5460$$

$$Chi_square\ tabel = (\alpha : 0,05; df : 4) = 9,4877293$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai statistik *LM test* sebesar 79,5460 > 9,4877293 (*chi-square tabel*) atau menolak H_0 (*Common Effect Model*, OLS) dan menerima H_a (*Random Effect Model*). Hal ini berarti bahwa teknik

estimasi yang tepat untuk model regresi panel data menurut uji-LM atau *LM test* adalah *Random Effect Model*.

Pemilihan Teknik Estimasi Panel Data Dengan Uji Hausman

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan model fixed effect atau model random effect. Jika nilai dari chi-square

(χ^2) hitung lebih besar dari chi-square (χ^2) tabel atau signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol (Random Effect Model) dan menerima H_a (Fixed Effect Model) sehingga pendekatan estimasi panel data yang lebih baik digunakan adalah Fixed Effect Model, begitu pula sebaliknya. Dari hasil pengujian dengan software EVIEWS 6.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel (2) Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: DATA			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.802531	4	0.0003

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Lampiran 2)

Tabel di atas memperlihatkan hasil uji Hausman untuk menentukan apakah memilih Model *Fixed Effect* (FEM) atau Model *Random Effect* (REM) yang akan digunakan. Diperoleh hasil bahwa *Chi-Square statistic* signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau menolak H_0 (*Random Effect Model*) dan menerima H_a (*Fixed Effect Model*). Indikatornya adalah nilai probabilitas *Chi-square statistic* sebesar $0,0003 < 0,05 (\alpha = 5\%)$. Dengan kalimat lain dapat disimpulkan bahwa model estimasi panel data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Estimasi Model Regresi Panel Data

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dengan uji-F, uji-LM dan uji Hausman maka teknik estimasi yang dipilih untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia adalah model

regresi panel data, dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Metode estimasi yang digunakan adalah *Generalized Least Square* (GLS) atau *Cross-Section Weight*, dengan asumsi

intersep/konstanta bervariasi antar wilayah sedangkan koefisien regresi diasumsikan sama, baik antar wilayah maupun antar waktu, sebagaimana persamaan berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \dots + \alpha_{11} D_{11i} + \beta_1 GEK_{it} + \beta_2 GKS_{it} + \beta_3 PTK_{it} + \beta_4 JPE + e_{it} \tag{7}$$

Dimana: IPM adalah kinerja pembangunan manusia, diukur dengan nilai indeks pembangunan manusia (persen). PEK adalah PEK adalah pengeluaran/belanja ekonomi pemerintah, diukur dengan nilai belanja urusan ekonomi pemerintah daerah dalam APBD (juta rupiah). GKS adalah pengeluaran/belanja pendidikan & kesehatan pemerintah, diukur dengan nilai belanja urusan pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah dalam APBD (juta rupiah).

PTK adalah produktivitas tenaga kerja, diukur dengan rasio tenaga kerja yang bekerja terhadap PDRB (juta rupiah). JPE adalah Jumlah penduduk, diukur dengan jumlah penduduk tahunan (orang). $\alpha_0 \alpha_1$ adalah intersep (konstanta). $\beta_1 \beta_4$ adalah koefisien regresi. E adalah *Error term* (variabel gangguan) *it* adalah Kabupaten/kota i pada tahun t. $D_2 \dots D_{11}$ = Variabel dummy kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Tabel (3) Ringkasan Hasil Estimasi Regresi Panel Data

Dependent Variable: IPMP				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Sample: 2009 2014				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 66				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.10103	6.175470	-2.283394	0.0266
GEK	0.621091	0.117831	5.271041	0.0000
GKS	0.240668	0.103737	2.319986	0.0244
PTK	1.572345	0.277927	5.657409	0.0000
JPE	6.260054	0.560098	11.17671	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.997621	Mean dependent var	115.5367	
Adjusted R-squared	0.996968	S.D. dependent var	62.92622	
S.E. of regression	0.432938	Sum squared resid	9.559219	
F-statistic	1527.510	Durbin-Watson stat	1.871545	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil estimasi secara parsial, diketahui bahwa semua variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, yang diindikasikan oleh $p\text{-value} < \alpha = 0,05$. Hasil uji-F (uji- simultan) juga menunjukkan adanya pengaruh semua variabel independen terhadap kinerja pembangunan manusia secara simultan pada tingkat signifikansi alfa sebesar 1% , ditunjukkan oleh nilai F-statistik sebesar 1527.510 atau $P\text{-value}$ sebesar $0,000 < 0,01$. Model regresi panel data yang digunakan sangat baik terlihat dari hasil nilai koefisien determinasi ($R\text{-squared}$, R^2) sebesar 0,980173 yang berarti bahwa variasi variabel dependen (POV) mampu dijelaskan oleh variabel independen (PE, RLS, AMH, KES) sebesar 98,02 % sedangkan sisanya sebesar 1,98 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Efek untuk masing-masing *unit cross section* yaitu untuk masing-masing wilayah kabupaten/kota merupakan *differential intercept* dari persamaan regresi. Efek tersebut akan membedakan intercept untuk persamaan pada masing-masing *unit cross section*. Perbedaan intercept untuk masing-masing wilayah kabupaten/kota tersebut menunjukkan adanya perbedaan faktor-faktor *endowment* (sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia) dan perbedaan kebijakan pemerintah masing-masing wilayah kabupaten/kota terutama terkait pembangunan manusia serta faktor-faktor lainnya. (Gujarati, 2009).

Tabel (4) Nilai *Effect Dummy Unit Cross-section*

No	Cross Section Unit (Kabupaten/Kota)	Effect
1	Kota Ambon	-0,68401
2	Maluku Tenggara Barat	-1.61605
3	Maluku Barat Daya	-2.86918
4	Maluku Tenggara	2.872176
5	Kota Tual	10.29922
6	Aru	1.04824
7	Maluku Tengah	-7.43477
8	Seram Bagian Barat	-3.24077
9	Seram Bagian Timur	-1.30662
10	Buru	-0.3825
11	Buru Selatan	3.314257

Sumber: Hasil pengolahan data

Adapun wilayah Kota Ambon memiliki nilai konstanta/intersep sebesar -0,68401 diinterpretasikan bahwa jika pengeluaran ekonomi pemerintah, belanja pendidikan & kesehatan pemerintah, tingkat produktivitas tenaga kerja dan jumlah penduduk diasumsikan konstan/tidak berubah maka indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut akan menurun sebesar 0,68 %.

Penurunan yang dominan terjadi pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan nilai intersep pada persamaan regresi sebesar -7,43477 sedangkan penurunan intersep/konstanta terendah terjadi di Kabupaten Buru yang memiliki intersep sebesar -0.3825, diinterpretasikan bahwa apabila pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi, pendidikan-kesehatan, produktivitas tenaga kerja dan jumlah penduduk konstan/tidak berubah akan menurunkan kinerja pembangunan manusia sebesar 0,38 %.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perbedaan kebijakan pemerintah khususnya pengalokasian/efektivitas belanja ekonomi, pendidikan dan kesehatan pemerintah, perbaikan produktivitas tenaga kerja dan permintaan efektif/potensi pasar melalui jumlah penduduk memberikan kontribusi signifikan terhadap perbedaan/perbaikan kinerja pembangunan manusia di masing-masing wilayah/daerah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kinerja Pembangunan Manusia

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah diwakili/diproksi dengan 2 (dua) variabel yaitu 1) variabel pengeluaran/belanja ekonomi pemerintah (GEK), 2)

variabel pengeluaran/belanja pendidikan-kesehatan pemerintah (GKS). Kedua variabel ternyata signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5 % atau tingkat kepercayaan sebesar 95 %.

Koefisien regresi variabel pengeluaran/belanja ekonomi pemerintah (GEK) yang dinotasikan dengan β sebesar 0,621091, diinterpretasikan setiap kenaikan belanja/pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan & kesehatan sebesar 1 (satu) % akan mengakibatkan peningkatan kinerja/indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 0,62 % (dibulatkan), dengan asumsi *ateris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

Sedangkan Koefisien regresi variabel pengeluaran pendidikan-kesehatan pemerintah (β) sebesar 0,240668, mengandung arti setiap kenaikan belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan & kesehatan pemerintah sebesar 1 (satu) % maka akan meningkatkan kinerja/indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 0,24 % (dibulatkan), dengan asumsi *ateris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

Hasil dalam penelitian ini sesuai/sejalan dengan hipotesis bahwa pengeluaran/belanja pemerintah baik di sektor ekonomi dan juga pendidikan-kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengaruh pengeluaran/belanja pemerintah terhadap kinerja/Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan dari 2 (dua) saluran. Saluran pertama, kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan diantaranya perbaikan dan penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan,

peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan medis. Semakin besar alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang diukur dengan angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan angka usia harapan hidup.

Perbaikan pada indeks pendidikan dan kesehatan sebagai komponen IPM akan memperbaiki kualitas Pembangunan Manusia. Pada saluran lain, alokasi belanja pemerintah daerah dengan tujuan perbaikan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat akan meningkatkan indeks pembangunan manusia karena daya beli masyarakat/pengeluaran konsumsi merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia.

Pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan manusia namun ada batasnya. Pengeluaran pemerintah akan mendukung pembangunan manusia apabila pemerintah mampu menciptakan kondisi di mana besarnya *share* pengeluaran pemerintah terhadap tingkat output seluruhnya dapat digunakan untuk menyediakan barang publik yang digunakan sebagai input produksi yang kompetitif.

Dengan demikian, peran terpenting dari pemerintah adalah dalam hal penyediaan barang publik. Pemerintah melakukan sejumlah pengeluaran atau belanja sebagai bentuk investasi pemerintah dalam membiayai atau mendanai fasilitas atau barang-barang publik tersebut. Investasi yang dilakukan pemerintah lebih banyak digunakan untuk membangun prasarana bagi masyarakat seperti: listrik, air, pendidikan, transportasi dan telekomunikasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.

Secara tidak langsung investasi pemerintah memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi karena prasarana maupun pelayanan yang disediakan pemerintah ini berguna dalam perekonomian. Semakin baik dan lengkap prasarana pemerintah maka perekonomian akan berjalan semakin lancar, dengan demikian kualitas pembangunan manusia tumbuh semakin pesat.

Ditinjau dari perspektif penelitian/studi terdahulu, hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa pengeluaran pemerintah (ekonomi, pendidikan, kesehatan) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia sama dengan kesimpulan studi/penelitian empiris yang dilakukan oleh Patta (2012)

di Sulawesi Selatan, Maliendra (2009) di Jawa Barat, Ginting (2008) dan Priska (2010) di Indonesia.

Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kinerja Pembangunan Manusia

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan cerminan dari seberapa besar tingkat pendapatan yang akan diterima oleh tenaga kerja. Rendahnya tingkat produktivitas akan menyebabkan upah atau pendapatan yang diterima oleh rumah tangga pekerja juga relatif rendah sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Provinsi Maluku. Persentase jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi menempatkan Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia.

Dalam penelitian ini, diperoleh koefisien regresi variabel tingkat produktivitas tenaga kerja (PTK) yang dinotasikan dengan (β) adalah sebesar 1,572345. Nilai koefisien variabel β secara statistik berpengaruh negatif signifikan pada tingkat signifikansi α (alfa) = 1 % atau tingkat kepercayaan 99 %. Koefisien regresi variabel tingkat produktivitas tenaga kerja (β) sebesar 1,572345 diinterpretasikan setiap kenaikan tingkat produktivitas tenaga kerja (PTK) sebesar 1 (satu) % akan mengakibatkan penurunan kinerja pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebesar 1,57 % (dibulatkan), dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

Hasil dalam penelitian ini mendukung/menguatkan hipotesis bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan melalui 2 (dua) saluran: Saluran pertama, tingkat produktivitas tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatan/pengeluaran penduduk khususnya pekerja.

Pendapatan/pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka pendapatan yang diterima oleh pekerja juga akan meningkat, sebaliknya tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah akan menurunkan pendapatan yang diterima oleh pekerja mengakibatkan nilai pengeluaran konsumsi penduduk bertambah rendah. Kondisi ini akan diperparah dengan jumlah penduduk

miskin yang semakin meluas, yang berpengaruh negatif terhadap kinerja pembangunan manusia.

Pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja pembangunan manusia dapat melalui saluran kedua. Tingkat produktivitas tenaga kerja dapat mempengaruhi kinerja pembangunan manusia melalui besar/kecilnya alokasi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan porsi pendapatan/pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu pendidikan & kesehatan.

Hasil empiris yang didapatkan dalam penelitian ini sama dengan kesimpulan dalam studi empiris yang dilakukan oleh Priska (2010) dan Mirza (2012) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Patta (2012) menyimpulkan bahwa persentase penduduk miskin dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan.

Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Kinerja Pembangunan Manusia

Dalam penelitian ini, faktor demografi diwakili oleh jumlah penduduk. Dampak penduduk terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu, 1) dampak negatif, penduduk dipandang sebagai beban bagi pembangunan. 2) dampak positif bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar dan memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan ekonomi (Todaro & Smith, 2006). Dampak negatif atau positif jumlah penduduk yang terjadi di suatu wilayah sangat ditentukan oleh kondisi wilayah dan karakteristik pertumbuhan, kualitas dan penyebaran penduduk.

Jumlah penduduk merupakan sumber perluasan pasar atau permintaan agregat yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Semakin besar jumlah penduduk maka berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan diharapkan berpengaruh positif juga pada kinerja pembangunan manusia.

Kondisi ini juga berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah yang lebih difokuskan pada wilayah-wilayah yang padat penduduknya dibanding wilayah/daerah yang jarang penduduknya. Provinsi Maluku masih diperhadapkan pada tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah dan tingkat penyebaran penduduk yang belum merata.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah, tingkat produktivitas tenaga kerja dan faktor demografi dengan kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Propinsi Maluku, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran ekonomi pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2009-2014. Koefisien regresi variabel pengeluaran ekonomi pemerintah (GEK) yang dinotasikan dengan β_1 sebesar 0,621091, diinterpretasikan setiap kenaikan belanja pemerintah daerah di sektor ekonomi sebesar 1 (satu) % akan mengakibatkan peningkatan kinerja pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 0,62 % (dibulatkan), dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).
- 2) Pengeluaran pendidikan-kesehatan pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2009-2014. Koefisien regresi variabel pendidikan-kesehatan (GKES) yang dinotasikan dengan (β_2) sebesar 0,240668, diinterpretasikan sebagai peningkatan belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan-kesehatan (GKS) sebesar 1 (satu) % maka akan meningkatkan kinerja pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 0,24 % (dibulatkan), dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).
- 3) Tingkat produktivitas tenaga kerja daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2009-2014. Koefisien regresi variabel tingkat produktivitas tenaga kerja (β_3) sebesar 1,572345, diinterpretasikan setiap kenaikan tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 1 (satu) % maka akan meningkatkan kinerja atau indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 1,57 % (dibulatkan), dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).
- 4) Faktor demografi yang diwakili oleh jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Maluku, pada tingkat signifikansi alfa sebesar

- 1 %. Dibandingkan dengan variabel bebas lain, jumlah penduduk memiliki pengaruh yang sangat dominan. Koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JPE) yang dinotasikan (β_1) sebesar 6,260054, diinterpretasikan setiap kenaikan tingkat penduduk sebesar 1 (satu) % maka akan meningkatkan kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 6,26 % (dibulatkan), dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).
- 5) Secara simultan/bersama-sama, variabel pengeluaran pemerintah (ekonomi dan pendidikan-kesehatan), tingkat produktivitas tenaga kerja dan faktor demografi (jumlah penduduk) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

Implikasi

- 1) Pembangunan manusia yang berkualitas sangat membutuhkan keseriusan pemerintah daerah dengan cara peningkatan alokasi belanja pemerintah daerah yang lebih besar untuk pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
- 2) Keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi penduduk pada wilayah-wilayah strategis memainkan peran penting dalam perbaikan pembangunan manusia. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
- 3) Dalam penelitian lanjutan, perlu penambahan atau diperluas dengan faktor-faktor lain yang secara teori berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga dapat menghasilkan temuan empiris yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Arsyad, Lincoln. (2004). "Ekonomi Pembangunan". Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.

Atmanti, Hastarini Dwi. (2005). "Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan". *Jurnal Dinamika pembangunan* Vol. 2 No. 1. Hlm 30-39.

Baltagi B H. (2005). "Econometrics Analysis of Panel Data Third Edition." England (GB): John Wiley and Sons, Ltd.

Brata, Gunadi, A. (2005). "Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan". Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.

Darmawan, Indra. (2006). "Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin". Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Ginting S, Charisma Kuniati, (2008). "Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia". [In]. Medan: Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.

Gujarati, N Damodar. (2009). "Basic Econometric", Third Edition. New York: Mc Graw Hill.

Hidayahwati, Nurul. (2011). "Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur". *Insi Jember: Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.

Kuncoro, Mudrajat, (2006). "Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan." Yogyakarta: Penerbit AMPYKPN.

Ladjan, Nurjanna. (2008). "Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)". *Insi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*

Maliendra, F. (2012). "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat". [Skripsi]. *Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor; Bogor*.

Mankiw, N. Gregory. (2003). "Teori Makroekonomi". Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mirza. (2012). "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 2 (1): 30-44.

Nazir, M. (2005). "Metode Penelitian". (Edisi Keenam). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Nurkolis. 2002. "Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang". <http://artikel.us/nurkolis5.html>

Patta D. (2012). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan". *Thesis: Makassar (ID): Universitas Hasanudin*.

Priska. (2010). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia". *Skrpsi Medan (ID): Universitas Sumatera Utara*.

Ranis, Gustav. (2005). "Human Development and Economic Growth". *Center Discussion of 32 Paper* No. 887.

- Sukirno S. (2004). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, C. (2005). "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional". *JMPK* 08/No.03/September/2005. Didownload dari berkas <http://www.jmpk-online.net/files/chriswaardanimknew>.
- Todaro, Michael. P & S. Smith. (2006). "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga" (Jilid Satu), Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Widarjono, A. (2010). "Ekonometrika : Teori dan Aplikasi". Edisi Kedua. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.